

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 hendaklah dipertahankan dengan gigih, melalui bukti dan tindakan. Bukti dan tindakan ini yakni dengan menegakkan kemerdekaan yang sesungguhnya dan mempertahankan negara yang baru berdiri ini dengan teguh. Hal ini dikarenakan kemerdekaan ialah mutlak dimiliki oleh seluruh bangsa dan pasti bangsa yang baru merdeka ini tidak ingin menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah lain (Malik, 1962). Sikap yang demikian dikarenakan, apa yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, masih tidak dapat diperkirakan. Kemerdekaan ini oleh pihak Belanda diyakini hal yang tidak sesuai, karena dianggap pemberian Jepang dan dalam hal ini Belanda menganggap Sukarno dan Hatta adalah kolaborator Jepang. Belanda juga masih sangat ingin menguasai Indonesia kembali. Pada saat-saat genting itu pemerintah harus bertindak secara cepat dan penuh persiapan (Noer, 2017).

Pada akhir Agustus 1945, pemerintah Republik telah berdiri di Jakarta, dibentuk pula sistem kabinet Presidensil dengan Ir. Sukarno sebagai ketuanya. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk dengan tugas untuk membantu presiden dan bertindak sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi atau kabupaten. Tujuan dari pembentukan ini semua adalah percepatan penyelesaian persoalan

administrasi karena dikhawatirkan Belanda akan berusaha menduduki Indonesia kembali (Wardani, 2017). Apa yang menjadi kekhawatiran para pemimpin bangsa Indonesia menjadi kenyataan, karena pada bulan September 1945 tentara sekutu telah tiba di Indonesia. Pendaratan tentara sekutu dilakukan setelah Jepang menandatangani surat-surat penyerahan kekuasaan kepada pihak sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di teluk Tokyo.

Setelah surat-surat penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu sudah ditandatangani maka pihak sekutu mempersiapkan kedatangan mereka ke Indonesia dengan mengirimkan tim pendahulu yang dipimpin oleh Mayor A.G. Greenhalgh. Pengiriman ini dilakukan pada tanggal 8 September 1945 oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten yang saat itu menjabat sebagai komandan sekutu untuk wilayah Asia Tenggara. Pendaratan pasukan sekutu di Indonesia bukan tanpa alasan. Pasukan sekutu yang mendarat di Indonesia mempunyai tugas, antara lain melucuti dan memulangkan tentara Jepang yang masih berada di Indonesia, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang untuk diserahkan kepada Belanda, memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah yang dikuasai oleh Jepang, membebaskan tawanan perang dan tawanan biasa, serta mencari dan mengadili penjahat perang (Luhulima, 2022).

Pada tanggal 29 September 1945 satuan pasukan sekutu yang diberi nama *AFNEI* yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison

mendarat di Jakarta. Kedatangan *AFNEI* ini terdiri dari tiga divisi, yaitu; 1) Divisi India ke dua puluh tiga di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthron yang bertugas untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat; 2) Divisi India ke lima di bawah pimpinan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh yang bertugas untuk wilayah Surabaya; dan 3) Divisi India ke dua puluh enam di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers yang bertugas untuk wilayah Padang dan Medan (Luhulima, 2022). Tentara *AFNEI* datang ke Indonesia bersama dengan *NICA* yang membawa orang-orang Belanda. Kedatangan *NICA* ke Indonesia yang membawa orang-orang Belanda tentu sudah dipersiapkan dengan baik. Tujuan kedatangan ini tentulah untuk menguasai Indonesia kembali. Sebagai modalnya Belanda membentuk *NICA* di Australia dan dibentuk juga dua belas detasemen *KNIL*. Selain itu juga telah ada perjanjian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris yang dilakukan seminggu sesudah kekalahan Jepang atas sekutu. Perjanjian ini disebut dengan “*Civil Affairs Agreement*” yang berlangsung di Chequers, Inggris pada tanggal 24 Agustus 1945.

Perjanjian ini berisi pengakuan Inggris atas kedaulatan Belanda di wilayah Indonesia yang tidak boleh disentuh kedudukannya oleh tentara pendudukan. Dengan adanya perjanjian ini pula dapat dipastikan bahwa *NICA*-lah yang akan menjalankan urusan-urusan sipil seluruhnya dengan tetap diawasi oleh panglima besar sekutu. Selain itu Inggris berjanji untuk sesegera mungkin menyerahkan tanggung jawab pemerintahan sipil dan

mempercepat pembentukan alat-alat administrasi dan kehakiman di Indonesia kepada Belanda. Dengan perjanjian ini berarti pemimpin-pemimpin Belanda dapat kembali ke Indonesia untuk segera memerintah Indonesia kembali seperti sebelum kedatangan Jepang pada tahun 1942 (Nasution, 1977). Dengan adanya perjanjian ini, maka pada hakikatnya tentara Inggris di Indonesia telah menjadi alat Belanda dalam usaha menjajah kembali Indonesia.

Pada awal Oktober 1945 pemerintahan Belanda mengumumkan bahwa Belanda tidak mengakui eksistensi Indonesia sebagai negara yang merdeka. Belanda juga menganggap bahwa Sukarno-Hatta adalah kolaborator Jepang dan keduanya harus diadili karena termasuk penjahat perang. Belanda menganggap bahwa setelah kekalahan Jepang, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Hindia Belanda dan banyak tindak kekerasan yang dilakukan. Belanda berpendapat bahwa Belanda sebagai negara induk berhak serta wajib untuk memulihkan kekuasaannya atas wilayahnya yang pernah dikuasai Jepang (Oostindie, 2016). Dalam usaha menguasai kembali Indonesia, Belanda menggunakan beragam siasat cerdiknya. Pada pendaratan yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, van der Plas dan beberapa tentara Belanda ikut serta di dalamnya. Pendaratan di wilayah Indonesia lain seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang pendaratannya dilakukan oleh tentara Australia, di dalamnya juga terdapat tentara Belanda. Tentara Belanda kemudian memanfaatkan keadaan yang demikian dengan sebaik-baiknya, tentara Belanda melakukan

teror di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain (Dekker, 1997).

Pada tahun 1946 pasukan tentara Inggris mulai mengizinkan tentara Belanda untuk menggantikan kedudukan tentara-tentara Inggris. Pada tahun ini pula di bulan Juli tentara Australia mulai meninggalkan daerah-daerah yang didudukinya dan terjadi penyerahan tanggung jawab dari pimpinan angkatan perang sekutu kepada Letnan Gubernur Jenderal van Mook yang mewakili Belanda. Pada akhir tahun 1946 tentara Inggris juga meninggalkan Sumatra dan Jawa. Setelah Belanda menduduki daerah-daerah yang sebelumnya di bawah pengawasan tentara sekutu, maka Belanda juga mulai melancarkan serangan-serangannya ke wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu 1947-1948 Belanda telah dua kali melakukan serangan secara mendadak dengan tujuan untuk menghancurkan Indonesia. Serangan ini terjadi pada 20 Juli 1947 dan 18 Desember 1948, yang oleh Belanda serangan ini dinamakan aksi polisionil (Tirtoprodjo, 1966).

Selain dengan serangan bersenjata, strategi Belanda lainnya dalam menguasai kembali Indonesia ialah dengan melakukan blokade terhadap Indonesia. Blokade Belanda atas Indonesia dimanfaatkan Belanda pasca ditandatanganinya Perjanjian Renville. Blokade ini juga diperparah dengan dikuasainya daerah-daerah yang memiliki stok pangan berlimpah oleh Belanda, sehingga mengakibatkan hyper inflasi. Selain itu rumah sakit serta klinik kebanyakan tidak mendapatkan obat dan alat bedah. Blokade Belanda

ini memang sengaja dilakukan untuk menekan Indonesia dan menciptakan kesulitan-kesulitan bagi Republik (Kahin, 1995).

Selain itu Belanda juga membentuk negara-negara bagian. Pembentukan negara-negara bagian ini diinisiasi oleh Letnan Gubernur Jenderal van Mook dengan tujuan untuk memecah belah persatuan Indonesia. Dalam pembentukan negara-negara bagian, van Mook telah mengadakan beberapa konferensi yang diawali dengan Konferensi Malino pada 16 Juli 1946. Pada Konferensi Denpasar yang diadakan pada bulan Desember 1946, disepakati sebuah dekret yang oleh van Mook kemudian dimanfaatkan untuk mendirikan Negara Indonesia Timur. Melalui dekret ini pula pada akhirnya muncul negara-negara bagian lain dan beberapa daerah otonom (Tirtoprodjo, 1966).

Pembentukan negara-negara bagian yang dilakukan oleh Belanda terus mengalami kemajuan dengan munculnya beberapa negara-negara bagian yang diinisiasi oleh van Mook. Pada tahun 1948 van Mook kemudian mendirikan BFO (*Bijeenkomst voor Federale Overleg*). BFO yang digagaskan oleh van Mook ini merupakan sebuah majelis permusyawaratan federal, yang terdiri atas pemimpin negara-negara federal. Tujuan dari pembentukan BFO ialah membentuk Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal dengan atau tanpa Indonesia (Ricklefs, 2022). Bentuk negara federal yang diinginkan oleh Belanda akhirnya terwujud melalui KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB sendiri melibatkan Republik Indonesia yang

delegasinya diketuai oleh Mohammad Hatta, BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid, dan Belanda yang delegasinya diketuai oleh van Maarseveen (Noer, 2017). Republik Indonesia Serikat akhirnya resmi berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda.

Strategi-strategi yang digunakan Belanda dalam usahanya menguasai kembali Indonesia, ternyata menjadi refleksi bagi para pemimpin bangsa tentang bagaimana mempertahankan eksistensi Indonesia. Salah satu tokoh bangsa yang turut merefleksi eksistensi Indonesia adalah Mohammad Natsir. Mohammad Natsir merupakan seorang negarawan yang dilahirkan dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dengan Khadijah pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Solok, Sumatra Barat. Ayah Natsir merupakan pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan ulama terkenal di daerahnya (Effendi, 2014).

Natsir menghabiskan masa kecilnya dengan mengikuti ayahnya yang seringkali pindah ke berbagai kota. Jenjang pendidikan pertama Natsir ditempuh di sebuah Sekolah II atau Sekolah Rakyat, dengan bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda (Hakim, 2019). Natsir kemudian melanjutkan pendidikannya ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yang berada di Padang, tepatnya HIS Adabiyah kemudian pindah ke HIS Solok mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan kesana. Natsir kemudian melanjutkan pendidikannya ke *Meer Uitgebreid Lager*

Onderwijs (MULO) yang berada di Padang. Setelah lulus dari MULO Padang, Natsir melanjutkan pendidikannya ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) yang berada di Bandung pada usia 19 tahun (Dzulfikriddin, 2010).

Pada saat bersekolah di MULO Natsir bergabung menjadi anggota kepanduan *Jong Islamieten Bond*, yaitu *Natipij* (*Nationale Indoneisische Padvinderij*). *Jong Islamieten Bond* merupakan organisasi pertama yang diikuti oleh Mohammad Natsir, menurut Natsir sendiri organisasi merupakan teman pelengkap pendidikannya saat di sekolah. Dari sini pula akan menumbuhkan bibit dalam diri Natsir sebagai pemimpin bangsa (Yusafri, 2012). Pada tahun 1930 Natsir mulai terjun dalam dunia politik dengan menjadi ketua PSI cabang Bandung, akan tetapi saat itu peranan Natsir belum terlihat. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, Natsir aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang kemudian berubah nama menjadi Masyumi. Pasca kemerdekaan, Natsir dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Penerangan (1946-1948), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Selain itu Natsir juga merupakan ketua Partai Masyumi, yang merupakan partai Islam terbesar saat itu (Rusli, 2018).

Pada saat Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat, Natsir melalui peran politiknya mencetuskan suatu mosi yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Mosi Integral Natsir ini merupakan kejelian

Natsir dalam melihat situasi saat itu, dengan Mosi Integral ini Natsir berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan yang diakibatkan oleh sistem federal yang dibentuk oleh Belanda (Tabroni & Qusyaeri 2017). Menurut Mohammad Natsir, yang menjadi pokok permasalahannya dan mesti dipecahkan dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah soal teknis, tentang apakah dengan cara penggabungan negara-negara bagian ke RI Yogyakarta atau langsung seluruh negara-negara bagian ini ke NKRI. Natsir menginginkan bahwa pembentukan NKRI haruslah tanpa menimbulkan konflik antar negara-negara bagian dan golongan masyarakat (Chamsyah, Bachtiar, 2008).

Dalam upayanya mewujudkan pembentukan NKRI tanpa menimbulkan konflik dan perpecahan, Natsir melakukan upaya dengan mengajak serta mengunjungi negara-negara bagian bentukan van Mook yang tergabung dalam RIS, seperti negara Pasundan, negara Sumatra, dan negara bagian lainnya. Selain itu Natsir juga mengajak dan pihak-pihak yang mendirikan dan mendukung konsep negara bagian untuk meleburkan diri menjadi NKRI (Yusuf & Jalil 2019). Upaya Natsir dalam menjaga eksistensi Indonesia kemudian membuahkan hasil, Natsir kemudian mengajukan sebuah mosi di parlemen pada tanggal 3 April 1950, mosi ini dikenal dengan nama Mosi Integral Natsir. Mosi yang diajukan Natsir mendapatkan sambutan baik dari parlemen dengan cara menyetujui langsung, mosi ini selain ditandatangani oleh Mohammad Natsir juga

ditandatangani oleh beberapa tokoh, baik yang bergolongan kanan sampai yang bergolongan kiri. Berbekal mosi inilah Presiden Sukarno meresmikan kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan pada 17 Agustus 1945.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Peran Politik Mohammad Natsir Pada Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)”. Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang banyak berjasa bagi bangsa Indonesia, Mohammad Natsir juga merupakan salah satu tokoh yang memiliki andil besar pada masa revolusi Indonesia, terlebih pada saat masa Republik Indonesia Serikat. Selain itu Mohammad Natsir juga berhasil menyatukan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk federal melalui mosi integralnya pada 3 April 1950. Peneliti menetapkan tahun 1949 sebagai awal mula berdirinya Republik Indonesia Serikat di mana ketika itu Belanda pasca Konferensi Meja Bundar mendirikan Republik Indonesia Serikat dengan total 16 negara bagian. Sedangkan tahun 1950 merupakan tahun di mana Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk federal, pada tahun ini pula Mohammad Natsir mencetuskan mosi integralnya.

Peneliti membandingkan beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang diangkat peneliti setelah peneliti mencari dari beberapa jurnal online, dan arsip skripsi Pendidikan Sejarah FIS UNJ. Penelitian pertama yang penulis temui berjudul “*Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia*” yang ditulis oleh Isti Karamah. Pada penelitian skripsi ini Isti lebih menekankan peranan

pemikiran Mohammad Natsir mengenai Islam sebagai ideologi negara yang bisa menjawab tantangan pasca kemerdekaan, sedangkan peneliti lebih menekankan peran politik Mohammad Natsir pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa Republik Indonesia Serikat. Sedangkan relevansi penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian di atas ialah sama-sama membahas mengenai implementasi/peran Mohammad Natsir pasca kemerdekaan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Reni Juwita yang berjudul “*Pemikiran Muhammad Natsir dalam Memperjuangkan Kembalinya RIS ke NKRI 1945-1951*” penelitian skripsi ini berfokus pada bagaimana Mohammad Natsir berusaha mengembalikan Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan setelah Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadikan Indonesia sebagai negara serikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat peneliti ialah penelitian ini hanya memfokuskan pada pembentukan negara federal dan usaha Mohammad Natsir dalam mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi kesatuan, sedangkan penelitian yang diangkat peneliti tidak hanya menjelaskan proses terbentuknya negara federal dan usaha Natsir secara umum dengan mengajukan mosi integral, tetapi diperdalam pula melalui peran dari Natsir dalam meyakinkan setiap fraksi di parlemen untuk menyetujui mosi yang diajukan. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama mengangkat peran Mohammad Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat, khususnya membahas mengenai peran Natsir di masa RIS.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Leonardo yang berjudul *“Pembentukan dan Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat”* penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pembentukan RIS serta dampaknya bagi Indonesia saat itu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti terletak pada fokus penelitian yang diangkat, fokus yang diangkat peneliti adalah peran Natsir pada masa RIS melalui mosi yang diajukannya dan bagaimana Natsir mampu menyakinkan setiap fraksi di parlemen untuk menyetujui mosi yang diajukannya itu. Sedangkan kesamaanya ialah sama-sama mengangkat mengenai masa Republik Indonesia Serikat.

Penelitian selanjutnya berjudul *“Peranan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik di Indonesia 1945-1958”* yang ditulis oleh Murtini. Penelitian skripsi ini lebih menekankan kepada peran politik apa saja yang pernah dilakukan Mohammad Natsir pada kurun waktu 1945-1958, selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan hasil dari peran politik Natsir pada kurun waktu 1945-1958. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diangkat peneliti terletak pada fokus pembahasan dan kurun waktu penelitian, fokus pembahasan peneliti hanyalah peran politik Mohammad Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat, khususnya peran Natsir melalui Mosi Integral Natsir. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang diangkat peneliti ialah sama-sama membahas peran politik Mohammad Natsir khususnya dekade awal kemerdekaan Indonesia.

Penelitian skripsi yang berjudul *“Revolusi Kebangsaan: Telaah Konsep Persatuan Mohammad Natsir (1908-1993)”* yang ditulis oleh Zul Ihsan Ma’arif lebih menekankan pada pemikiran Mohammad Natsir mengenai persatuan. Pemikiran Natsir dalam penelitian ini difokuskan pada Mosi Integral Natsir serta polemik kebangsaan Islam dan nasionalisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat ialah penelitian ini hanya memfokuskan penelitiannya pada ruang lingkup persatuan melalui Mosi Integral dan ideologi Islamisme yang dianut oleh Natsir, sedangkan penelitian yang peneliti angkat berfokus pada satu ruang lingkup saja, yaitu peran Natsir pada masa RIS khususnya mengenai Mosi Integral Natsir dan bagaimana cara Natsir dalam meyakinkan fraksi-fraksi di parlemen untuk menyetujui mosi integral tersebut. Sedangkan persamaannya terletak pada bagaimana Natsir sebagai negarawan dengan pemikiran dan aksi politiknya mampu tetap menjaga persatuan bangsa Indonesia yang mana Belanda mencoba untuk memecah belah persatuan itu.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai peran politik Mohammad Natsir sebagai salah satu tokoh yang mempunyai peran penting dalam menjaga eksistensi Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950. Pembatasan masalah dalam penelitian ini bersifat temporal dan spasial.

Pembatasan temporal dalam penelitian ini merujuk pada tahun 1949-1950. Diawali tahun 1949 karena pada tahun ini Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan munculnya Republik Indonesia Serikat. Sedangkan tahun 1950 diambil karena pada tahun ini Mohammad Natsir dalam parlemen RIS berpidato agar Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan melalui mosi integralnya. Selain itu pada tahun ini juga tepatnya tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia secara resmi kembali kepada bentuk negara kesatuan.

Secara spasial penelitian ini dibatasi pada peran politik Mohammad Natsir sebagai salah satu tokoh bangsa yang mempunyai andil besar dalam mempertahankan eksistensi Indonesia, khususnya pada masa Republik Indonesia Serikat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- a. Apa peran politik Natsir pada masa RIS?
- b. Bagaimana strategi Mohammad Natsir meyakinkan fraksi-fraksi di parlemen?

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran politik Mohammad Natsir dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia melalui mosi integralnya. Dengan adanya tulisan ini diharapkan pembaca dapat mengenal lebih dalam tokoh Mohammad Natsir sebagai tokoh yang berhasil menyatukan kembali Indonesia melalui mosi integralnya.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian sejarah nasional Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat, khususnya mengenai peran Mohammad Natsir pada masa itu.

b. Kegunaan Praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian ilmu sejarah pada masa Republik Indonesia Serikat.

Penelitian ini juga bisa dijadikan referensi mengenai peranan tokoh Mohammad Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat.

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah atau metode historis. Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo terdiri dari lima tahap, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018).

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik adalah sebuah proses di mana peneliti menentukan objek yang ingin diteliti. Pemilihan topik didasarkan pada dua hal, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dalam melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti sangat tertarik dan gemar membaca buku sejarah mengenai periode revolusi Indonesia khususnya mengenai peranan kelompok Islam. Sedangkan kedekatan intelektualnya yakni peneliti sangat tertarik dengan pemikiran Mohammad Natsir, khususnya pemikiran Mohammad Natsir dalam bidang politik. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran politik Natsir pada masa RIS.

b. Heuristik

Heuristik merupakan sebuah proses dalam penelitian sejarah dengan mencari dan mengumpulkan sumber. Sumber sejarah menurut penyampaiannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip-arsip sejarah yang disimpan di perpustakaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, perpustakaan nasional Republik Indonesia dan buku yang ditulis

langsung oleh Mohammad Natsir, seperti *Capita Selecta 2* dan *Politik Melalui Jalan Dakwah*. Sedangkan untuk sumber sekunder yang digunakan peneliti adalah buku atau artikel yang membahas mengenai revolusi Indonesia dan pemikiran serta peran politik Mohammad Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat, seperti buku *Mosi Integral Natsir 1950* karya Ahmad Murjoko, dan *17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia Terbentuk* karya James Luhulima.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan sebuah tahapan di mana dilakukan kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang didapat. Kritik sumber dibagi menjadi dua macam, yaitu autentisitas atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kritik intern. Pada kritik ekstern peneliti membandingkan data yang ditemukan pada satu sumber dengan sumber lainnya yang sudah pasti dapat dipercaya, sedangkan pada kritik intern peneliti melakukan kritik dengan cara menyamakan sumber satu dengan sumber lainnya yang sejenis, apakah dalam sumber yang peneliti dapat itu terdapat keterbaruan data atau adanya kontradiksi dengan sumber-sumber sebelumnya yang peneliti dapatkan.

d. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan penafsiran sejarah melalui sumber-sumber yang telah di verifikasi sebelumnya. Dalam interpretasi terdapat dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan penafsiran dari data-data yang telah dikritik, sedangkan sintesis yaitu menyatukan data-data sejarah yang sudah dikritik untuk dijadikan fakta sejarah. Peneliti

dalam tahapan ini melakukan analisis terhadap data-data yang sudah diperoleh untuk dijadikan fakta sejarah yang kemudian ditulis untuk menjawab rumusan masalah.

e. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi ialah sebuah proses dalam penelitian sejarah di mana fakta sejarah yang sudah ditemukan dalam data-data yang terkumpul ditulis secara terstruktur untuk menjadi sebuah jawaban bagi rumusan masalah. Peneliti akan menyajikan bentuk deskripsi naratif dalam penulisan sejarah dengan cara menuliskan fakta-fakta sejarah yang telah dihimpun untuk menjawab rumusan masalah.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang akan dilakukan peneliti dari penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama mengenai pendahuluan yang berisi dasar pemikiran, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan bahan sumber, serta sistematika penulisan. Bab kedua mengenai peran politik Natsir pada masa RIS, yang berisi biografi Mohammad Natsir, proses terbentuknya Republik Indonesia Serikat, dan peran politik Natsir pada masa RIS.

Pada bab ketiga berisi mengenai cara Natsir dalam meyakinkan fraksi-fraksi yang ada di parlemen, yang terdiri dari parlemen RIS, strategi

Natsir dalam meyakinkan setiap fraksi di parlemen, dan tanggapan dari setiap fraksi di parlemen atas mosi integral. Sedangkan bab keempat berisi mengenai kesimpulan.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 14 bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Berikut adalah timeline penelitian:

No	Nama Kegiatan	Progress																								
		2022							2023											2024						
		Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Pencarian Sumber	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2	Penyusunan Bab I							■	■	■	■	■	■	■												
3	Seminar Proposal												■													
4	Penyusunan Bab II																		■	■	■	■	■			
5	Penyusunan Bab III																						■	■		
6	Penyusunan Bab IV																							■		
7	Wawancara																							■		

Table 1 : Jadwal Penelitian

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*